

## ANALISIS KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MAGELANG TAHUN 2018 - 2021

Amanda Yulia Damayanti<sup>1)</sup>, Annisa Nur Afifah<sup>2)</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

<sup>1,2,3)</sup> [amandayulia326@gmail.com](mailto:amandayulia326@gmail.com) , [annisa.nur.afifah@students.untidar.ac.id](mailto:annisa.nur.afifah@students.untidar.ac.id), [sucinasehati@untidar.ac.id](mailto:sucinasehati@untidar.ac.id)

### ABSTRACT

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang dari tahun 2018 – 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi Kota Magelang dan BPS Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata target dan realisasi PAD Kota Magelang selalu meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir dari 2017 – 2021. Laju pertumbuhan rata-rata pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang selama empat tahun dari tahun 2019 – 2022 adalah 12,71%, sedangkan kontribusi rata-rata pajak kendaraan bermotor selama lima tahun adalah 7,35%. Pada tahun 2018, kontribusinya sebesar 0,029%, pada tahun 2019 sebesar 0,089%. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah tentang pentingnya penguatan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang.

**Kata kunci:** Kontribusi; Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah

### 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggoongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah menurut (Riftiasari, 2019). Pemerintah dapat memungut pajak sebagai pembayaran yang diperlukan menurut PERPU Perpajakan dan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan negara. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah dalam UU Pengelolaan Daerah dan dapat diperluas sesuai dengan kondisi daerah. Menurut Halim (2002), Pemerintah daerah dikatakan mandiri, jika daerah tersebut mampu membiayai kegiatan yang dianggarkan, membiayai pekerjaan social, dan perencanaan atau target pembangunan daerah melalui pendapatan daerahnya sendiri. Hal tersebut sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang menyangkut perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk melaksanakan kebijakan daerah, pemerintah pusat menyerahkan tugas ke pemerintah daerah untuk menyelenggarakan beberapa tugas yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga untuk mewujudkan daerah otonom, maka pemerintah dianjurkan untuk mengidentifikasi bidang-bidang mana saja di daerah yang mempunyai peluang dalam hal memajukan pembangunan daerah, terutama dalam hal meningkatkan PAD. Partisipasi penduduk daerah dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah dapat membantu menambah pendapatan asli daerah. Menurut (Mardiasmo, 2016), PAD dapat diartikan sebagai sumber penghasilan daerah yang penting untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang penting dalam menunjang PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dipungut dari setiap pembelian kendaraan bermotor serta surat-surat kendaran bermotor yang menjadi tanggung jawab pengguna dan menjadi tanggungan sebagian besar pendapatan daerah, termasuk di kota Magelang. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pembayaran negara. Besarnya pajak mobil ditentukan oleh peraturan pemerintah daerah setempat dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya (Kusuma, 2021).

Kontribusi PAD begitu penting bagi pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, maka dari itu partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi penting dalam rangka peningkatan PAD. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut dari setiap kendaraan bermotor merupakan salah satu dari beberapa sumber dana PAD. Pajak

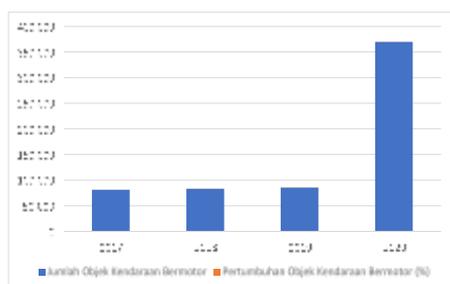
Kendaraan Bermotor (PKB) juga merupakan sumber pendapatan penting di Kota Magelang yang jumlah kendaraan bermotornya cukup banyak.

Menurut (Priyono, 2019), PAD sangat penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di kota-kota, termasuk Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kontribusi pungutan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD di Kota Magelang dari tahun 2017 hingga 2021, serta strategi yang tepat untuk meningkatkan pungutan pajak tersebut. Meskipun terjadi perubahan kebijakan dalam iuran pajak kendaraan bermotor, tetapi demikian iuran pajak kendaraan bermotor terus tumbuh hingga beberapa tahun terakhir dan mencapai Rp 32,6 T pada tahun 2020. Pada kondisi yang sama, jumlah pajak kendaraan bermotor dari pendapatan daerah dapat bervariasi sesuai dengan keadaan dan karakteristik perpajakan masing-masing daerah. Oleh karena itu, analisis pengaruh pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tiap daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat penting untuk menyadari berapa besar kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah dan bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan pemungutan pajak.

**Tabel 1. Jumlah Objek Kendaraan Bermotor di Kota Magelang 2017 – 2021**

TAHUN	Jumlah Objek Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan Objek Kendaraan Bermotor (%)
2017	81,115	-
2018	83,000	2
2019	85,634	3
2020	369,753	77
2021	653,872	43

Sumber: BPS Kota Magelang, 2023



Sumber: BPS Kota Magelang, 2023

**Gambar 1. Jumlah Objek Kendaraan Bermotor Kota Magelang**

Gambar 1 menunjukkan jika jumlah target kendaraan bermotor di Kota Magelang bertambah setiap tahunnya atau mencapai target pajak. Di tahun 2017 bertambah sebesar 2%, tahun 2018 bertambah sebesar 3%, tahun 2019 bertambah sebesar 77% dan tahun 2020 bertambah sebesar 43%. Namun, pada tahun 2020, kenaikannya berkurang 34%, karena

hanya ada kenaikan objek pajak sebesar 284.119. Jumlah objek pajak kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan dapat mempengaruhi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Magelang.

Penelitian sebelumnya (Wijaya & Setiawan, 2019) menjelaskan jika pajak kendaraan memberikan kontribusi yang penting bagi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan riset yang berjudul “Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun 2018 - 2021” dengan tujuan mengukur seberapa kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang periode 2018 - 2021.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Siahan, 2013 dalam (Mafaza, et al., 2016) pajak daerah merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk membayar sejumlah biaya kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 mendefinisikan pajak daerah sebagai pembayaran wajib yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan oleh seseorang atau organisasi untuk membayar ke suatu daerah, yang tidak ada kompensasi langsungnya, dan yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan sosial dari provinsi, orang-orang di daerah tersebut. Selain itu, Perda No. 9 pada tahun 2010, menjelaskan jika pajak daerah dapat diartikan sebagai penghasilan daerah yang penting bagi daerah tersebut, yang memiliki manfaat sebagai pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengatur pembangunan dan penyelenggaraan daerah melalui sistem otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pungutan pajak, retribusi daerah, hasil perolehan kekayaan daerah tertentu dan penerimaan lainnya yang sah. Daerah memiliki peluang yang baik dalam melaksanakan pembangunan daerah, jika semakin banyak PAD yang diterima. Kemampuan daerah dalam mengatur dana yang berasal dari masyarakat dan pembangunan daerah dapat dilihat dari PAD suatu daerah tersebut. PAD merupakan pendapatan sah yang diterima provinsi dari sumber penghasilan daerah, dan sumber daya alam serta kegiatan ekonomi dan kegiatan penghasil pendapatan sah lainnya (Mardiasmo, 2016).

Secara umum, menurut (Sugiyanto, 2016) sumber PAD dibagi menjadi dua bagian: (1)

pendapatan daerah dari sumber daya alam, seperti PBB, PKB, pajak hotel, pajak restoran, dll; (2) pajak daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi lainnya, seperti pajak reklame, hiburan, retribusi pasar dan lain-lain.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor memiliki tujuan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan oleh pengguna jalan ditentukan oleh pemerintah kota dan biasanya tergantung pada jenis kendaraan, umur kendaraan dan nilai kendaraan. Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sumber penghasilan daerah yang penting, namun masih terdapat kendala dalam pemungutannya. Misalnya, ketidaktahuan masyarakat tentang pembayaran pajak dan banyaknya kendaraan bermotor yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan berbagai langkah untuk memberikan penyuluhan akan pentingnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak dan untuk meningkatkan penegakan hukum terkait kendaraan bermotor yang tidak terdaftar (Sujarwo, 2021).

Masa pajak kendaraan bermotor diatur sebagai berikut (1) Pajak kendaraan bermotor ditetapkan masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak pendaftaran kendaraan tersebut; (2) Pajak kendaraan dibayar di muka; (3) Pajak kendaraan bermotor karena keadaan darurat, pajak tersebut maksimal 12 bulan, dapat dikembalikan selama masa pajak dibayar; (4) Ketentuan lain mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan direktur pelaksana (Gubernur).

### 3. METODOLOGI

Objek dalam penelitian ini yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), karena kontribusi terhadap pajak endaraan bermotor menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Magelang. Dari hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Magelang dari periode tahun 2017- 2021. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu mengetahui seberapa jauh pengaruh dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang.

Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini dari BPKAD Kota Magelang, website datago.magelangkota.go.id, dan BPS Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari sumber tersebut, yang meliputi majalah dan artikel yang berkaitan dengan pajak mobil. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif sebagai teknik analisis data, yaitu teknik analisis data yang menguraikan laporan-laporan yang telah

dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang akurat. Metode ini dipilih karena peneliti menganalisis penerimaan kas sebagai indikator untuk mendapatkan gambaran penerimaan pajak kendaraan Kota Magelang dan dasar proyeksi PAD. Data tersebut kemudian diolah sehingga dapat ditarik kesimpulan kebenarannya, yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Beberapa tahapan analisis data (Muchtari, et al., 2017) :

1. Melakukan identifikasi data penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- b. Perhitungan laju pertumbuhan PKB untuk setiap tahun:

$$TK = \frac{(N(t) - N(t - 1))}{N(t - 1)} \times 100\%$$

Penjelasan:

TK = Penerimaan PKB dari tahun yang dihitung.

N(t) = Data penerimaan PKB tahun yang dihitung.

N(t-1) = Data penerimaan PKB satu tahun yang lalu.

- c. Perhitungan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD:

$$Kontribusi = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

X = besarnya realisasi pajak kendaraan bermotor

Z = besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

2. Membuat kesimpulan mengenai hasil pengelolaan data pajak kendaraan bermotor Kota Magelang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

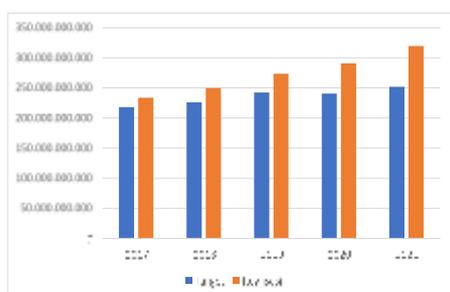
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, terdapat data pencapaian PAD Kota Magelang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Magelang**

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	218.085.185.000	233.557.714.356	107,09
2018	225.916.332.000	249.873.268.826	110,60
2019	242.404.296.000	273.582.932.151	112,86
2020	240.421.207.000	290.756.816.510	120,94
2021	251.821.486.000	319.391.277.825	126,83

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2023

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan atau pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Tujuan utama pendapatan asli daerah adalah untuk menjamin kemandirian daerah dalam memperoleh sumber keuangan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan asas desentralisasi.



Sumber: Data Olahan Microsoft Excel, 2023

**Gambar 2. Target dan Realisasi Penerimaan PAD**

Berdasarkan informasi yang diberikan dapat dilihat bahwa tujuan dan pelaksanaan PAD Kota Magelang tahun ke tahun selalu berkembang. Pada tahun 2017, target dan kinerja PAD sebesar 107,09%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 3,51%. Ada juga peningkatan 2,26% pada 2019 dan 8,08% pada 2020. Pada 2021, kenaikannya kembali menjadi 5,89 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PAD di Kota Magelang selalu mengarah pada peningkatan pendapatan daerah yang positif.

Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor, yaitu persentase pertumbuhan selama satu tahun anggaran terhadap pajak kendaraan bermotor di setiap daerah, sangat penting untuk diperhitungkan oleh pemerintah daerah. Berikut disajikan tabel realisasi dan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor Kota Magelang dari tahun 2019 – 2021

**Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor**

Tahun	Penerimaan Pajak PKB	Laju Pertumbuhan (%)
2019	24.441.739.925,00	27,02
2020	26.441.596.850,00	7,56
2021	28.845.135.000,00	8,33
2022	31.330.585.500,00	7,93

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2023

Berdasarkan informasi di atas disimpulkan bahwa laju dari pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di

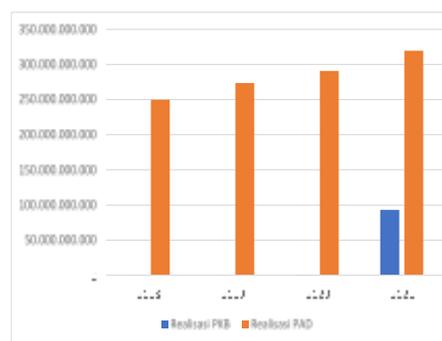
Kota Magelang selama empat tahun terakhir berfluktuasi, yaitu meningkat sebesar 27,02 persen pada tahun 2019, kemudian menurun. 19,46 % pada tahun 2020. Tentang dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. Pada tahun 2021, pajak kendaraan bermotor kembali naik sebesar 0,4%. Oleh karena itu, Pemda Kota Magelang harus menyadarkan masyarakat akan pentingnya wajib pajak membayar pajak kendaraan.

Besarnya kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang periode tahun 2018 – 2021 tercatat rendah, namun kontribusi tersebut dipengaruhi oleh pendapatan lain sektor pajak dan retribusi daerah lainnya, sehingga tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor saja.

**Tabel 4. Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD Kota Magelang tahun 2018 – 2021**

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi per tahun (%)
2018	73.665.000	249.873.268.826	0,029
2019	237.171.750	273.582.932.151	0,086
2020	589.403.500	290.756.816.510	0,20
2021	93.008.487.500	319.391.277.825	29,12
Rata - rata			7,35

Sumber: Data diolah excel, 2023



Sumber: Data Olahan Microsoft Excel, 2023

**Gambar 3. Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD Kota Magelang**

Berdasarkan informasi yang diperlukan untuk menghitung pangsa PAD terhadap PDB, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak motor berpengaruh terhadap PAD, meskipun tidak terlalu besar. PAD Kota Magelang tidak hanya bergantung pada penerimaan PKB tetapi juga pajak daerah dan pajak daerah lainnya. Dengan demikian proporsi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD tahun 2018 sebesar 0,029%, tahun 2019 sebesar 0,089%, tahun 2020 sebesar 0,20% dan tahun 2021 sebesar 29,12%. pajak kendaraan bermotor sebesar 29,12%. Penerimaan PAD cukup tinggi yaitu sebesar Rp319.391.277.825 yang dipengaruhi oleh sektor pajak dan pungutan daerah lainnya.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 – 2021, target dan realisasi PAD Kota Magelang selalu meningkat.
2. Laju pertumbuhan PKB Kota Magelang selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2019 – 2022 rata-rata sebesar 12,71%.
3. Besarnya kontribusi PKB Kota Magelang selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 7,35% dengan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 29,12%. Besarnya kontribusi ini dapat menunjukkan pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu dari sumber pendapatan daerah Kota Magelang.

### 5.2. Saran

Dari apa yang sudah dibahas bahwasannya terdapat beberapa saran yang diberikan kepada pemerintah Kota Magelang yaitu:

1. BPKAD Kota Magelang selalu mengharapkan untuk mempertahankan kebijakan yang telah dirumuskan untuk memajukan kemakmuran Kota Magelang. Masyarakat kota Magelang;
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang terus meningkatkan penerimaan PAD melalui pengelolaan sumber daya yang ada dan;
3. SAMSAT Kota Magelang sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar seperti pengenaan denda. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, A., 2021. Tinjauan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Hukum Bisnis*, VOL 3(2).
- Mafaza, W., Mayowan, Y. & Sasetiadi, T. H., 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 11(1).
- Mardiasmo, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F. & Susilowati, D., 2017. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 1(3).

Priyono, H., 2019. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 7(2).

Sugiyanto, 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sujarwo, H., 2021. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 9(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wijaya, R. A. & Setiawan, R., 2019. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 8(1).